

SUMBER DAYA PENGELOLA TRANSPORTASI PUBLIK PERKOTAAN: STUDI BUS TRANS METRO PEKAN BARU

Raden Imam Al Hafis dan Abdul Hakim

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang
e-mail: imam.al.hafis@gmail.com

Abstract: *Transportation is the lifeblood of the development of an area, if an area has a good transport system and can accommodate all mobility needs of the existing community, then the area will be developed and grew rapidly both in the field of economic, social, political and territorial. It takes a good resource, be it human resources, budget resources, and facilities to support resource management in the implementation of urban public transportation. Many inadequate resources management in the implementation of urban public transport such as bus stops where the facilities are minimal. Difficulties in recruiting and retaining competent administrators, salaries, prestige and job security is low. Availability of good human resources, budget and facilities is a requirement of successful implementation and management will produce an output that is in line with expectations. For the necessary cooperation from the government to the private sector to undertake the management of urban public transport (bus of trans metro pekanbaru).*

Keywords: *transportation, transportation management*

Abstrak: Transportasi merupakan urat nadi dari perkembangan suatu Daerah, apabila suatu daerah memiliki sistem transportasi yang baik dan bisa mengakomodir semua kebutuhan mobilitas masyarakat yang ada, maka daerah tersebut akan maju dan tumbuh dengan pesat baik dibidang ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan. Maka dibutuhkan sumberdaya yang baik. Baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan transportasi publik perkotaan (Bus Trans Metro Pekanbaru). Banyak sumberdaya yang kurang memadai dalam pelaksanaan pengelolaan transportasi publik perkotaan seperti keberadaan halte dengan fasilitas yang sangat minim. Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator yang kompeten, gaji, prestise dan jaminan kerja yang rendah. Ketersediaan sumberdaya, baik manusia, anggaran dan fasilitas merupakan sayarat dari keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dan akan menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan. Untuk itu diperlukan kerjasama dari pemerintah kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru).

Kata Kunci: transportasi, manajemen transportasi

Transportasi merupakan topik perbincangan yang tidak henti-hentinya dibahas baik dari kalangan akademisi, praktisi, swasta sampai dengan masyarakat. Hal ini tidak lain karena mengingat bahwa transportasi merupakan urat nadi dari perkembangan suatu Kota atau Daerah, apabila suatu kota atau daerah memiliki sistem transportasi yang baik dan bisa mengakomodir semua kebutuhan mobilitas masyarakat yang ada, maka daerah tersebut akan maju dan tumbuh dengan pesat. Karena dengan adanya sistem

transportasi yang baik juga berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan perekonomian yang stabil.

Dengan adanya transportasi, menyebabkan nilai barang lebih tinggi ditempat tujuan daripada tempat asal, dan nilai ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutannya. Nilai atau kegunaan yang diberikan oleh pengangkutan adalah berupa kegunaan tempat (*place utility*) dan kegunaan waktu (*time utility*). Kedua kegunaan diperoleh jika barang telah diangkut ketempat dimana

nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya.

Transportasi memberikan jasanya kepada masyarakat, yang disebut jasa angkutan. Sebagaimana sifat jasa-jasa lainnya, jasa angkutan akan habis dengan sendirinya, dipakai ataupun tidak dipakai. Jasa angkutan merupakan hasil/keluaran (*output*) perusahaan angkutan yang bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa angkutan bus, dan lain-lain). Adapun fungsi transportasi yaitu sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Transportasi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari bersangkut paut dengan masalah produksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhannya yang beraneka ragam. Oleh karena itu, manfaat transportasi dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat yang dapat dikelompokkan dalam manfaat ekonomi, sosial, politik, dan kewilayahan.

Beberapa pendapat diajukan oleh para ahli terkait dengan pengertian transportasi seperti yang dikemukakan oleh Sani (2010, h. 2) menyampaikan bahwa transportasi merupakan kegiatan perpindahan manusia atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya atau dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan menggunakan wadah yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Pandangan di atas juga disepakati oleh Miro (2005, h. 4), beliau mengemukakan pandangan bahwa transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain, objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Kusbiono (2003, dikutip dari Ishak, 2010; h. 41) prasarana transportasi mempunyai peran ganda di dalam pembangunan wilayah, yakni (1) merangsang pertumbuhan, dan (2) menjawab kebutuhan sesuai dengan perkembangan pertumbuhan. Terkait dengan peran pertama, prasarana transportasi adalah prasyarat penting dalam pembentukan tata ruang, dan demikian juga merupakan alat untuk mengarahkan perkembangan tata ruang wilayah. Kemudahan yang dapat diperoleh karena transportasi bagi manusia adalah mudahnya mengatasi jarak antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam atau barang produksi yang dibutuhkan manusia yang terletak pada masing-masing geografi.

Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik.

Oleh karena itu dalam pengelolaan transportasi yang baik agar terwujud keseimbangan antara pertumbuhan baik dibidang perekonomian, sosial, politik dan kewilayahan maka dibutuhkan sumberdaya yang baik. Baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya fasilitas yang mendukung, maka akan terbentuk satu kesatuan sistem yang saling mendukung pertumbuhan yang diinginkan tersebut.

Dengan adanya sumberdaya manusia yang baik, ahli dan berkompeten dibidangnya maka akan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan efektif sesuai dengan keinginan dan tujuan dari kebijakan. sumberdaya yang kompeten dan ahli juga harus didukung dengan sumberdaya anggaran yang cukup. Apabila sumberdaya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan tidak mencukupi maka kualitas pelayanan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan juga akan kurang memuaskan dan terbatas sesuai dengan anggaran yang tersedia. Ketersediaan sumberdaya manusia dan anggaran juga harus didukung dengan sumberdaya fasilitas, Edward III (1980 dalam Widodo, 2012, h. 102) menyebutkan bahwa "*physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won't succeed*". Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Mengapa demikian, karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pengguna/masyarakat atau target group untuk memanfaatkan layanan transportasi publik ini, karena pada dasarnya menginginkan hal yang terbaik saat menikmati pelayanan yang ada.

Selain yang dipaparkan oleh Edward III tersebut di atas Grindle yang dikutip Agustino (2008, h. 156) juga mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari *Content* dan *Context of Policy*. Yaitu Grindle dalam Agustino

(2008; h. 156) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari *Content dan Context of Policy*. *Content of Policy* terdiri dari (a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), (b) *Type of Benefits* (tipe manfaat), (c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), (d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), (e) *Program Implementer* (pelaksana program), dan (f) *Resources Committed* (sumberdaya-sumberdaya yang digunakan). Sedangkan *Context of Policy* terdiri dari: (a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), (b) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), dan (c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Dalam pelaksanaan pengelolaan transportasi publik perkotaan (Bus Trans Metro Pekanbaru) ditemui banyak sumberdaya yang kurang memadai dalam pelaksanaannya, yang paling banyak dan mudah ditemui yaitu keberadaan halte dengan fasilitas yang sangat minim. Hal yang dipaparkan sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh beberapa para ahli terkait dengan sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan yang ideal.

Kurangnya keterampilan dalam pengelolaan terhadap transportasi publik (Bus Trans Metro Pekanbaru) merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber yang dapat digunakan untuk latihan profesional. Kesulitan lain yaitu adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator-administrator yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise dan jaminan kerja mereka yang rendah.

Sehingga dari pemaparan permasalahan diatas maka tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui sumberdaya pengelola transportasi publik perkotaan (Bus Trans Metro Pekanbaru).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian atau fenomena di lapangan apa adanya. Menurut Staruss dan Corbin (2012, h. 5) penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh

dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh menurut Staruss dan Corbin di atas, Sarwono (2011, h. 17) mengemukakan pandangannya terkait dengan penelitian kualitatif bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu) serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dengan *key informant* yang dianggap mengetahui terkait data yang dibutuhkan, serta melakukan pengamatan atau observasi dilokasi penelitian dan peninjauan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian untuk melengkapi data-data sekunder dalam penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data spiral yang disampaikan oleh Creswell (2007, h. 151) yang memulai dengan pengkoleksian data, selanjutnya membaca dan membuat memo terhadap data yang telah diperoleh, kemudian melakukan pengolahan data, selanjutnya menggambarkan data perolehan dilapangan, tahap selanjutnya yaitu dengan memilah atau mengklasifikasikan data serta menafsirkan data yang diperoleh dengan kejadian dilapangan dan selanjutnya data yang diperoleh digambarkan dengan mewakili permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lamban seadanya. Sedangkan, sumberdaya finansial (Anggaran) menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan financial (Anggaran) yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan berjalan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Edward III (1980, dikutip oleh Widodo, 2012, h. 98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya merupakan peranan yang sangat penting dalam

implementasi kebijakan. Lebih lanjut penjelasannya mengenai pentingnya peranan implementasi kebijakan bahwa "bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Hal serupa juga disampaikan oleh Van Horn dan Van Matter (1974, dikutip oleh Widodo, 2012; h. 98) yang menyatakan *"new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Sumberdaya manusia (*human resources*) merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980, dikutip oleh Widodo, 2012; h. 98) menegaskan bahwa *"Probably the most essential resources in implementing policy is staff"*. Sumberdaya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Edward III (1980) pada bagian sebelumnya menegaskan bahwa *"No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective"*. Jika demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumberdaya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumberdaya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sekalipun demikian, agar diperoleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal itu ditegaskan oleh Edward III (1980) bahwa *"It is not enough for there to be an adequate number of implementors to carry out a policy. Implementors must possess the skill necessary for the job at hand"*. Selain itu, sumberdaya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*). Oleh karena itu, sumberdaya manusia

pelaku kebijakan (*implementors*) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (*rules and regulations*) berlaku.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru) yang telah dibahas pada bagian sebelumnya memang ditemui bahwa pelaksanaannya telah diisi oleh tenaga pelaksana yang sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, namun terdapat beberapa bagian yang dinilai perlu namun adanya kekurangan tenaga tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan pada bagian atas bahwa keberadaan sumberdaya manusia yang baik dan berkualitas juga tidak akan dapat berjalan secara efektif, jika kebijakan yang akan dijalankan masih adanya kekurangan tenaga pelaksana.

Sumberdaya manusia pelaku kebijakan pengelolaan transportasi publik perkotaan (*implementors*) juga harus mengetahui orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Di samping itu, sumberdaya manusia pelaku kebijakan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak cukupnya sumberdaya berarti peraturan (*law*) tidak akan bisa ditegakkan (*enforced*), pelayanan tidak disediakan, dan peraturan yang digunakan tidak bisa dikembangkan.

Dengan demikian, sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru) di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan) juga harus mencukupi di semua bidang, sehingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru) dapat berjalan dan terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, sumberdaya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

Sumberdaya Anggaran. Sumberdaya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumberdaya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan

transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru).

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh Edward III (1980, dikutip oleh Widodo, 2012; h. 100) dalam kesimpulan studinya yakni *"Budgetary limitations, and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of the services that implementors can be provide to the public"*. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan incentive sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Berkaitan dengan hal itu, Van Horn dan Van Matter (1974) menyatakan *"new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*. Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup. Berkaitan dengan hal ini, Edwards (1980) menegaskan bahwa *"Changing the personnel in government bureaucracies is difficult and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors disposition is to alter the disposition of existing implementors through the manipulation of incentives by high-level policy makers may influence their action"*.

Besar kecilnya insentif tersebut dapat memengaruhi sikap dan perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk *"rewards and punishment"*. Meskipun dalam pelaksanaannya diakui sulit seperti yang ditegaskan oleh Edwards III (1980) bahwa *"Rewards are the other side of the incentive coin, but they are even more difficult for executives to administer than penalties. In all levels of the executive and judicial branch of government, individual performance is difficult to reward with pay increases"*. Bahkan insentif tersebut dapat mengarah pada terjadinya *"goal displacement"* para pelaku kebijakan, sebagaimana digambarkan oleh Edwards III (1980) bahwa *"Incentives can be to goal displacement. Bureaucrats who are provided*

incentive to implement policies may begin to pursue goals other than those intended by their superior. Vague and diverse goal, poor measure of performance, and obscure implementation directives make it difficult to evaluate the success of many policies. When a criterion of success is developed for a policy, bureaucrats may attempt to beat the system by emphasizing most whatever is being measured by their superiors, independent of whether or not their action advance the policy goal".

Dalam kondisi seperti yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya keuangan (anggaran), akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pengelolaan transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru) akan dapat menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan atau menyediakan sistem insentif bagi para petugas pelayanan, manajer program dan mungkin juga masyarakat yang dilayani.

Sehingga dari pernyataan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan penetapan insentif bagi para pelaksana kebijakan pengelolaan transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru) dapat memberikan dampak yang besar bagi loyalitas pelaksana kebijakan pengelolaan transportasi publik perkotaan ini dalam membantu terlaksana dan tercapainya tujuan dari keberadaan transportasi publik ini. Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Edward III, 1980, dikutip oleh Widodo, 2012; h. 102).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pengaruh terbatasnya fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan kebijakan? Edwards III (1980) menegaskan bahwa *"physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff may*

understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won't succeed". Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Mengapa demikian, karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pengguna/masyarakat atau *target group* untuk memanfaatkan layanan transportasi publik ini, karena pada dasarnya menginginkan hal yang terbaik saat menikmati pelayanan yang ada.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan besar bahwa keberadaan sumberdaya manusia yang baik dan berkualitas sangat dibutuhkan agar kebijakan pengelolaan transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru) dapat terlaksana dengan baik, namun juga hal yang perlu diperhatikan yaitu kecukupan tenaga pelaksana kebijakan itu sendiri dan fasilitas yang disediakan baik bagi pelaksana kebijakan itu sendiri maupun kepada masyarakat sebagai *target group* dari keberadaan kebijakan itu sendiri.

KESIMPULAN

Untuk sumberdaya manusia yang ada dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru) memang sudah terqualifikasi dengan baik berdasarkan kebutuhan yang diperlukan namun, tenaga pelaksana kebijakan tersebut masih dinilai mempunyai peran ganda dalam melaksanakan tugas. Sehingga masih membutuhkan tenaga pelaksana lain agar pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana tanpa harus memberikan peran ganda. Untuk sumberdaya anggaran dinilai sudah tersedia bantuan dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dari hasil pelaksanaan kegiatan operasional bus trans metro Pekanbaru. Untuk sumberdaya fasilitas memang masih perlu ditingkatkan, karena salah satu faktor penunjang terlaksananya sebuah kebijakan yaitu harus dilengkapi dengan keberadaan fasilitas yang memadai dan baik.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan terutama dibidang transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru) diperlukan dukungan dari ketersediaan berbagai sumberdaya. Ketersediaan sumberdaya, baik manusia, anggaran dan fasilitas merupakan syarat dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan akan menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan. Untuk itu diperlukan kerjasama dari pemerintah kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan transportasi publik perkotaan (bus trans metro pekanbaru) agar tujuan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dalam memeberikan layanan dibidang transportasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dapat terlaksana secara efektif dan efesien.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, Jhon, W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: Sage Publication.
- Miro, F. 2005. *Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- Sani, Z. 2010. *Transportasi (Suatu Pengantar)*. Jakarta: UI-Press.
- Sarwono, J. 2011. *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif secara Benar*. Jakarta: Elex Media Komputino.
- Strauss, A., & Corbin, J. 2012. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, J. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.